

Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*

Rafika Putri Utami¹, Muhammad Syafiqurrahman²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan, 57126

ARTICLE INFO

Key words:

komite audit, komite remunerasi, eksternal audit, manajemen risiko, tax avoidance

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the parts of a supporter of good corporate governance and audit committee, remuneration committee, external audit and management of risks to tax avoidance. Tax avoidance in this study measured by book tax difference. The sample of this study were 198 manufacturing companies listed in BEI in 2012-2014. The sample was chosen by method purposive sampling. Test regression analysis shows that statistically significant proved is the audit committee, audit external program, and risk management to tax avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh organ-organ pendukung good corporate governance yaitu komite audit, komite remunerasi, eksternal audit dan manajemen risiko terhadap tax avoidance. Tax avoidance pada penelitian ini diukur dengan Book Tax Difference (BTD). Sampel penelitian ini adalah 198 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan komite audit, eksternal audit dan manajemen risiko terhadap tax avoidance.

1. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap praktik *corporate governance* (CG) pada perusahaan telah meningkat dalam dasawarsa terakhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti Enron Corporation dan Worldcom (Maharani, 2012). Isu *corporate governance* (CG) di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997-1998). Berbagai pihak menyatakan bahwa lemahnya *corporate governance* menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan faktor penting dalam pemulihan krisis ekonomi, mengingat *good corporate governance* merupakan alat penting dalam menciptakan organisasi yang efisien dan efektif.

Corporate governance merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengurangi *agency problem* dengan meningkatkan pemantauan terhadap tindakan manajemen, membatasi perilaku oportunistik manajer, dan mengurangi risiko informasi yang ditanggung oleh pemegang saham. Konsep

corporate governance (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika perusahaan telah *listing* di Bursa Efek Indonesia. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menggantikan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, menyebutkan bahwa laporan tahunan yang disampaikan wajib memuat tata kelola perusahaan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (2011) mendefinisikan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kewajaran dan keselara-

* Korespondensi Penulis: ¹ rafikaputriutami@gmail.com, ² msyafiqurrahman13@gmail.com

san. Tujuan utama dilaksanakannya GCG adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam jangka panjang. Agar implementasi GCG di Perseroan dapat berjalan dengan efektif, maka dibuatlah kerangka kerja (*framework*) implementasi GCG yang memberikan gambaran umum mengenai keterkaitan organ-organ GCG, pedoman-pedoman dan pelaporan-pelaporan yang relevan.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Tax avoidance merupakan salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak suatu negara. *Tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chasbiandani dan Martani, 2012). Salah satu bentuk pengawasan bagi tindakan manajerial dalam bidang pajak adalah membentuk tata kelola perusahaan yang baik (Maharani, 2015). Menurut prinsip-prinsip *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* (2004) yang dikutip oleh Friese, Link dan Mayer (2006) menyebutkan bahwa penting untuk menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan sistem pajak. Secara spesifik yang ingin diketahui antara lain adalah pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Meskipun penelitian di Indonesia mengenai *corporate governance* sudah banyak dilakukan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih sedikit yang mengaitkan dampak dari Organ-organ Pendukung GCG terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* dalam penelitian ini mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) yang dikeluarkan PT. Bursa Efek Indonesia (2011). Penelitian ini mengambil Organ Pendukung yang ada dalam *framework* Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) tersebut sebagai variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap *tax*

avoidance.

Didalam kerangka kerja (*framework*) Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut terlihat bahwa RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan. Karena pentingnya peranan organ tersebut, maka ketiganya disebut sebagai Organ Utama GCG. Selanjutnya Organ Utama ini dibantu oleh Organ-organ Pendukung. Organ-organ Pendukung GCG sebagai variabel independen dipilih dalam penelitian ini karena kebanyakan penelitian terdahulu yang meneliti mengenai *corporate governance* menggunakan Organ Utama, sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menguji pengaruh dari Organ-organ Pendukung GCG terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Organ-organ Pendukung GCG tersebut adalah Komite-komite Direksi yang di dalamnya terdapat Komite Audit dan Komite Remunerasi, Komite-komite Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Eksternal Audit, Internal Audit dan Manajemen Risiko. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan semua organ pendukung tersebut sebagai variabel independen yang akan diteliti karena keterbatasan literatur yang diperoleh.

Organ-organ Pendukung GCG yang diteliti dalam penelitian ini adalah Komite Audit, Komite Remunerasi, Eksternal Audit dan Manajemen Risiko. Penelitian sebelumnya terkait dengan *corporate governance* dan *tax avoidance* sudah banyak dilakukan, antara lain oleh Sari dan Martani (2010), Sartori (2010), Timothy (2010), Annisa dan Kurniasih (2012), Puspita dan Harto (2014), Rusyandi dan Martani (2014), Winarsih *et al* (2014), Darmawan dan Sukartha (2014), dan Prakosa (2014).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti mengenai pengaruh dari organ-organ pendukung *good corporate governance* yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (2011) terhadap *tax avoidance*.

2. RERANGKA TEORI

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan dalam memahami *corporate governance* (Anggit dan Shodiq, 2014). Para pemegang saham yang mengendalikan sendiri perusahaannya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui kinerjanya sendiri. Sebaliknya, ketika para pemegang saham tersebut mempercayakan perusahaannya kepada seorang manajer atau pengelola (*agent*) akan timbul masalah yang disebut konflik kepen-

tingan (*agency problem*). Dasar hubungan keagenan ini adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal* atau investor) dan pengendalian (*agent* atau manajer), dimana pemisahan fungsi tersebut menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Konflik kepentingan ini terjadi ketika tujuan manajemen sebagai *agent* tidak selaras dengan tujuan perusahaan.

Gagasan *corporate governance* muncul atas kegagalan dari tata kelola perusahaan perusahaan besar. Kegagalan tersebut terjadi dengan timbulnya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaannya. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Enron, Sunbeam, Worldcom, Adelphia, Tyco dan beberapa perusahaan minyak (Weston *et al*, 2004). *Cadbury Committee*, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengartikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

PT Bursa Efek Indonesia pada Maret 2011 mengeluarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*). Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta kewajaran dan kesetaraan (Pedoman Tata Kelola Perusahaan, 2011). Kunci sukses dan berkesinambungan dari implementasi di BEI adalah berfungsinya organ-organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama GCG akan sangat terbantu bila mana terdapat organ-organ pendukung GCG yang juga berfungsi secara efektif. Untuk itu diperlukan suatu pedoman tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*) yang merupakan himpunan pokok-pokok pengelolaan Perseroan yang kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam piagam, kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang akan menjadi acuan implementasi GCG BEI (Pedoman Tata Kelola Perusahaan, 2011).

Organ-organ Pendukung GCG adalah Komite-komite Direksi yang di dalamnya terdapat Komite Audit dan Komite Remunerasi, Komite-komite Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Eksternal Audit, Internal Audit dan Manajemen Risiko. Dalam pene-

litian ini peneliti tidak menggunakan semua organ pendukung tersebut sebagai variabel independen yang akan diteliti karena keterbatasan literatur yang diperoleh. Organ-organ Pendukung GCG yang diteliti dalam penelitian ini adalah Komite Audit, Komite Remunerasi, Eksternal Audit dan Manajemen Risiko.

Undang-undang perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Brian dan Martani, 2014). Penerapan sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia seakan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak, dalam hal ini adalah perusahaan, tentu saja ingin menekan biaya perusahaan, termasuk di dalamnya beban pajak. Dalam upayanya memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan dapat menggunakan dua cara, yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan pajak yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang (penggelapan pajak) (Brian dan Martani, 2014).

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak (Masrani dan Martani, 2010). *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. *Tax avoidance* sangat mungkin terjadi karena aturan atau undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang disebabkan oleh kompleksitas hukum pajak (Maharani, 2015). Kompleksnya aturan pajak memungkinkan timbulnya penafsiran yang menguntungkan Wajib Pajak, yang kemudian memicu lahirnya *tax avoidance*.

Komite Audit adalah organ pendukung dalam *Good Corporate Governance* yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya. Komite Audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992) dalam Hanum (2013). Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh Komite Audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Komite Audit berfungsi memberikan pandangan mengenai

masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003).

Hasil penelitian Winarsih *et al* (2014) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran Komite Audit, monitoring terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen bisa diminimalisir, sehingga dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dengan baik. Berjalannya fungsi Komite Audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *Good Corporate Governance* (Andriyani, 2008). Fungsi Komite Audit yang berjalan dengan efektif akan dapat mencegah konflik keagenan, meningkatkan fungsi pengawasan perusahaan yang lebih baik, dan dapat meningkatkan kinerja keuangan (Hasanah *et al*, 2014).

H1 : Komite Audit yang diproksikan dengan Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Komite Remunerasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan memberikan masukan terhadap remunerasi Direksi dan Komisaris, termasuk metode penentuannya (Pedoman Tata Kelola Perusahaan, 2011). Tidak adanya Komite Remunerasi dalam sebuah perusahaan memungkinkan adanya kesempatan bagi eksekutif untuk memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri dengan membayarkan kenaikan gaji, sehingga melawan kepentingan pemegang saham.

Pembentukan Komite Remunerasi oleh perusahaan merupakan sarana untuk meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang berjalan dengan efektif akan berpengaruh meningkatkan nilai perusahaan. Komite Remunerasi yang berjalan efektif akan meminimalkan kesempatan bagi eksekutif untuk memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri dengan membayarkan kenaikan gaji yang melawan kepentingan pemegang saham. Adanya Komite Remunerasi tentu juga akan berpengaruh dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak, karena dengan adanya Komite Remunerasi beban gaji perusahaan juga dapat dikontrol, sehingga eksekutif tidak bisa seenaknya melakukan kenaikan gaji yang akan menyebabkan kenaikan beban gaji perusahaan. Kenaikan beban gaji akan menyebabkan penurunan laba, yang kemudian berpengaruh pada menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

H2: Komite Remunerasi yang diproksikan dengan Keberadaan Komite remunerasi berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Annisa dan Kurniasih, 2012). Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik. Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka mengetahui sebelumnya.

Audit berkualitas tinggi (*high-quality auditing*) seharusnya dapat bertindak sebagai penekan bahkan mungkin mencegah tindakan menguntungkan diri sendiri pihak-pihak tertentu. Auditor berkualitas tinggi sering diasumsikan mampu mencegah dan mengurangi praktik-praktik akuntansi yang dipertanyakan dan melaporkan kesalahan-kesalahan serta ketidakteraturan yang material daripada auditor berkualitas rendah (Nastiti dan Gumanti, 2011).

Ali dan Hartono (2003) menyatakan bahwa kualitas audit tidak dapat diobservasi, sehingga auditor berusaha untuk mengkomunikasikan kualitas mereka melalui sinyal seperti reputasi atau *brand names*. Penunjukkan auditor *Big 4* merupakan sinyal bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki reliabilitas yang tinggi. Annisa dan Kurniasih (2012) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan Maharani dan Suardana (2014) kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit yang tinggi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Kualitas audit yang tinggi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Asfiyati, 2012).

H3: Auditor Eksternal yang diproksikan dengan Brand Names Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Keinginan untuk memberikan kontribusi laba yang besar pada para pemegang saham didapatkan pada pajak yang merupakan beban sebagai pengurang laba, sehingga tidak jarang perusahaan juga melakukan manajemen pajak, baik yang bersifat *avoidance* maupun *evasion* guna meminimalkan kewajiban pajak perusahaan tersebut (Septiani dan Martani, 2014). *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tentu akan memperburuk citra perusahaan dimata *stakeholders*. Penghindaran pajak tidaklah tanpa biaya, biaya yang mungkin timbul adalah biaya langsung, termasuk pelaksanaan, berkurangnya reputasi perusahaan, hukuman potensial, dan sebagainya. Pengaruh langsung dari penghindaran pajak, yaitu dapat meningkatkan arus kas melalui penghematan pajak tetapi berkaitan juga dengan tingginya biaya agensi. Di sisi lain, pengaruh perubahan tidak langsung dari agresivitas penghindaran pajak adalah akan mempersulit transaksi bisnis, kurangnya transparansi informasi, dan nilai perusahaan yang rendah (Prasiwi, 2015).

Manajemen risiko atau *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola semua risiko dalam perusahaan. *Risk Management Committee* (RMC) merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Perusahaan yang memiliki RMC dapat lebih banyak mencurahkan waktu, dan kemampuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dan menyelesaikan berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan (Andarini dan Januarti, 2010).

H4: Manajemen Risiko yang diproksikan dengan Keberadaan Risk Management Committee berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen penelitian ini adalah organ-organ Pendukung *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi, Eksternal Audit, dan Manajemen Risiko terhadap *Tax Avoidance* yang mengacu pada penelitian Rusyandi dan Martani (2014) dengan menggunakan proksi *Book Tax Difference*.

Penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan dan kriteria tertentu sehingga sampel yang didapat relevan dengan tujuan penelitian. Sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014; (2) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2012- 31 Desember 2014; (3) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada periode 2012-2014; dan (4) Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah (Rp), sehingga tidak terjadi perbedaan karena kurs yang terus berubah apabila disajikan dengan satuan mata uang yang lain.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) dan Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2012-2014.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate*, *Cash Effective Tax Rate*, dan *Book Tax Difference*. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Organ-organ Pembantu *Good Corporate Governance* yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi, Eksternal Audit dan Manajemen Risiko.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* perusahaan dengan proksi *Book Tax Difference* (BTD) yang mengacu pada penelitian Rusyandi dan Martani (2014). Pengukuran *tax avoidance* diukur dengan menggunakan proksi kesenjangan atau beda dari laba akuntansi dan laba fiskal. BTD dalam penelitian ini adalah perbedaan laba berdasarkan buku di kurang dengan laba berdasarkan pajak dibagi dengan total aset. BTDit digunakan dalam penelitian ini untuk melambangkan proksi *book tax difference*.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organ-organ Pendukung *Good Corporate Governance*. Organ-organ Pendukung tersebut yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi, Eksternal Audit dan Manajemen Risiko.

Komite Audit sebagai struktur *corporate governance* mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (Wawo, 2010). Dalam penelitian ini digunakan jumlah Komite Audit dalam satu perusahaan sebagai alat ukur dan dilambangkan dengan KOM_AUDit.

Melalui Komite Remunerasi, perusahaan dapat mengukur tingkat kompensasi yang sesuai agar mampu menstimulasi manajemen meningkatkan kinerja perusahaan melalui manajemen pajak (Irawan dan Farahmita, 2012). Dalam penelitian ini. Pembentukan Komite Remunerasi oleh perusahaan merupakan sarana untuk meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan keberadaan Komite Remunerasi dalam satu perusahaan. Dengan menggunakan variabel *dummy*, apabila perusahaan memiliki Komite Remunerasi maka diberikan nilai 1, apabila sebaliknya diberikan nilai 0. Komite Remunerasi dalam penelitian ini dilambangkan dengan KOM_RMNSit.

Auditor berkualitas tinggi sering diasumsikan mampu mencegah dan mengurangi praktik-praktik akuntansi yang dipertanyakan dan melaporkan kesalahan-kesalahan serta ketidakteraturan yang material daripada auditor berkualitas rendah (Nastiti dan Gumanti, 2011). Ali dan Hartono (2003) menyatakan bahwa kualitas audit tidak dapat diobservasi, sehingga auditor berusaha untuk mengkomunikasikan kualitas mereka melalui sinyal seperti reputasi atau *brand names*. Penunjukkan auditor *Big 4* merupakan sinyal bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki reliabilitas yang tinggi. Eksternal audit dalam penelitian ini diukur menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit sebuah perusahaan. Penilaian menggunakan variabel *dummy*. Bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* maka diberikan nilai 1, dan jika sebaliknya maka diberikan nilai 0. Variabel ini dilambangkan dengan EKS_AUDit.

Implementasi ERM erat kaitannya dengan penerapan *Good Corporate Governance* (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Hal ini karena aspek pengawasan yang dilakukan dewan komisaris, komite pengawasan manajemen risiko, dan eksternal auditor merupakan kunci penting terlaksananya sistem manajemen risiko yang efektif. Apabila dilaksanakan dengan efektif, sistem Manajemen Risiko dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan *Good Corporate Governance* perusahaan. Dalam penelitian

ini Manajemen Risiko diukur dengan menggunakan keberadaan *Risk Management Committee* (RMC) dalam sebuah perusahaan. Dengan menggunakan variabel *dummy*, apabila perusahaan memiliki *Risk Management Committee* maka diberikan nilai 1, dan apabila sebaliknya maka diberikan nilai 0. Variabel ini dilambangkan dengan RMCit.

Pada penelitian ini variabel kontrol yang digunakan adalah Size (ukuran perusahaan). Size di-proksikan dengan Logaritma Natural (Total Aset) dan dilambangkan dengan SIZE.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian ini sebanyak 198. Hasil pengujian berupa analisis statistik deskriptif, uji koefisien determinan, dan uji F dapat dilihat pada lampiran.

Hasil dari pengujian dapat dilihat bahwa Uji statistik F memiliki *asymptotic sig.* kurang dari 0,05 ini berarti model regresi dalam penelitian ini sudah layak digunakan. Melalui uji statistik t, dapat dilihat bahwa Hipotesis 1 diterima karena nilai *sig.* yang lebih dari 0,10. Hasil uji analisis tersebut menunjukkan secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan Komite Audit yang di-proksikan dengan Jumlah Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012). Hasil ini menunjukkan bahwa Komite Audit yang merupakan bagian dari perseroan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik. Sriwedari (2009) menjelaskan bahwa keberadaan Komite Audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut komite audit diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh elemen-elemen lain berada didalam perusahaan menyebabkan komite audit gagal melakukan pengawasan yang baik dan cenderung netral (Hanum & Zulaikha, 2013).

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen perusahaan terhadap kebijakan beban pajak yang terkait dengan aktifitas penghindaran pajak. Jumlah anggota komite audit pada perusahaan manufaktur tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak.

Hasil dari pengujian dapat dilihat bahwa Uji statistik F memiliki *asymptotic sig.* kurang dari 0.05 ini berarti model regresi dalam penelitian ini sudah layak digunakan. Melalui uji statistik t, dapat dilihat

bahwa Hipotesis 2 ditolak karena nilai sig. yang lebih dari 0.05, dapat dilihat bahwa Komite Remunerasi yang diproksikan dengan Keberadaan Komite Remunerasi tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Belum ada penelitian yang meneliti mengenai pengaruh keberadaan Komite Remunerasi terhadap *Tax Avoidance*. Komite Remunerasi yang belum berjalan efektif, sehingga belum dapat meminimalkan kesempatan bagi eksekutif untuk memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri dengan membayarkan kenaikan gaji yang melawan kepentingan pemegang saham. Adanya Komite Remunerasi belum dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Hasil dari pengujian dapat dilihat bahwa Uji statistik F memiliki asymp sig. kurang dari 0.05 ini berarti model regresi dalam penelitian ini sudah layak digunakan. Melalui uji statistik t, dapat dilihat bahwa Hipotesis 3 diterima karena nilai sig. yang kurang dari 0.05, dapat dilihat bahwa Auditor Eksternal yang diproksikan dengan *Brand Names* Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012). Penelitian Antonius dalam Luhgiatno (2008) menjelaskan bahwa kredibilitas pelaporan keuangan eksternal menjadi suatu permasalahan bagi para pemakai informasi keuangan yang disebabkan oleh kesalahan audit. Contohnya pada kasus Enron tahun 2000 yang melaporkan pendapatan lebih dari yang seharusnya dan dibenarkan oleh KAP Arthur Andersen sebagai auditor eksternalnya. Adanya manipulasi pendapatan yang dilakukan nantinya juga akan menguntungkan perusahaan dalam hal pajak yang harus dibayar oleh Enron, sehingga kasus ini membuktikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa KAP yang memiliki *brand names* bagus tidak melakukan suatu tindakan kecurangan.

Hasil dari pengujian dapat dilihat bahwa Uji statistik F memiliki asymp sig. kurang dari 0.05 ini berarti model regresi dalam penelitian ini sudah layak digunakan. Melalui uji statistik t, dapat dilihat bahwa Hipotesis 4 diterima karena nilai sig. yang kurang dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif dari Manajemen Risiko yang diproksikan dengan *Risk Management Committee* terhadap *Tax Avoidance*. Belum ada penelitian yang membahas mengenai pengaruh *Risk Management Committee* terhadap *Tax Avoidance*. Manajemen risiko atau *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola semua risiko dalam perusahaan. *Risk Management Committee* (RMC) merupakan

salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Keberadaan *Risk Management Committee* dalam sebuah perusahaan juga belum bisa meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014:

1. Komite Audit yang diproksikan dengan Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Komite Remunerasi yang diproksikan dengan Keberadaan Komite Remunerasi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Eksternal Audit yang diproksikan dengan *Brand Names* Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Manajemen Risiko yang diproksikan dengan *Risk Management Committee* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Keterbatasan penelitian ini adalah belum meneliti semua organ-organ pendukung GCG, organ-organ pendukung GCG yang diteliti dalam penelitian ini hanya Komite Audit, Komite Remunerasi, Eksternal Audit, dan Manajemen Risiko. Pengukuran *Tax Avoidance* masih bersifat taksiran dan pendekatan, bukan angka yang sebenarnya karena alasan untuk mendapatkan data pajak yang dibayar sebenarnya adalah sulit karena bersifat rahasia.

Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memasukkan organ-organ pendukung GCG yang lain untuk diteliti pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Kemudian, apabila data pajak penghasilan perusahaan memungkinkan untuk diperoleh, maka data tersebut dapat digunakan sebagai proksi *tax avoidance* yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Saiful, dan Hartono Jogyanto. 2003. Pengaruh Pemilikan Metode Akuntansi terhadap Tingkat Underpricing Saham Perdana. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 6. 1, Januari 2003, Halaman 41-53.
- Andarini, P., dan I. Januari. 2010. Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan terhadap Pengungkapan *Risk Management*

- Committee (RMC) pada Perusahaan Go Public Indonesia. 2010. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.*
- Andriyani, N. K. 2008. Pengaruh *Investment Opportunity Set (IOS)*, Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* pada Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007). *Skripsi*. Denpasar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Indonesia.
- Anggit, D. T., dan M. J. Shodiq. 2014. Hubungan antara Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2008-2010). *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram. Universitas Mataram. Lombok.*
- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8(2): 123-136.
- Asfiyati. 2012. Pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Brian, I., dan D. Martani. 2014. Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga terhadap Waktu Pengumuman Laporan keuangan Tahunan Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram. Universitas Mataram, Lombok.*
- Chasbiandani, T., dan D. Martani. 2012. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.*
- Darmawan, I. G. H., dan I. M. Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9 (1): 143-161.
- Dewi, N. N., dan I. K. Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(2): 249-260.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper.
- Hanum, H. R. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. *Skripsi*. Program Sarjana (S1). Universitas Diponegoro Semarang.
- Hanum, H. R., dan Zulaikha Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting* 2: 1-10.
- Hasanah, F., H. Yanto, dan B. D. Handayani. 2014. Model Pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Sustainability Report* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram. Universitas Mataram, Lombok.*
- Hasanah, F., H. Yanto, dan B. D. Handayani. 2014. Model Pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Sustainability Report* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram. Universitas Mataram, Lombok.*
- Irawan, H. P., dan A. Farahmita. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.*
- Luhgiatno. 2008. Analisis Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan yang Melakukan IPO di Indonesia). <http://eprints.undip.ac.id>
- Maharani, D. 2012. Analisis Mekanisme *Corporate Governance* Perusahaan terhadap Pemilihan Auditor Eksternal. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.*
- Maharani, D. P. 2015. Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. *Skripsi*. Program Sarjana (S1). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Maharani, I. G. A. C., dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance*

- Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9 (2): 525-539.
- Masrani, I., dan D. Martani. 2010. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Mayangsari, S. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. 16-17 Oktober 2003. Surabaya.
- Meizaroh, dan J. Lucyanda. 2011. Pengaruh *Corporate Governance* dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Nastiti, A., dan T. A. Gumanti. 2011. Kualitas Audit dan Manajemen Laba pada *Initial Public Offerings* di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT. Bursa Efek Indonesia, Maret 2011.
- Prakosa, K. B. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram, Lombok*. Universitas Mataram.
- Prasiwi, K. W. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Puspita, S. R, dan P. Harto. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2):1-13.
- Rusyadi, M. K., dan D. Martani. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Aggressive Tax Avoidance*. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*. Universitas Mataram, Lombok.
- Sari, D. K., dan D. Martani. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, *Corporate Governance*, dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Sartori, Nicola. 2010. Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. www.ssrn.com
- Septiani, S., dan D. Martani. 2014. Analisis *Corporate Governance* dan Reformasi Perpajakan terhadap Manajemen Laba dan Manajemen Pajak pada Perusahaan Terdaftar di BEI. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*. Universitas Mataram, Lombok.
- Sriwedari, Tuti. 2009. *Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. <http://eprints.unsut.ac.id>
- Timothy, Y. C. K. 2010. Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness. Hong Kong Baptist University.
- Wawo, A. 2010. Pengaruh *Corporate Governance* dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Daya Informasi Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Wawo, A. 2010. Pengaruh *Corporate Governance* dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Daya Informasi Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Weston, J F, Mark, L M; dan J H Mulherin. 2004. *Takeover, Restructure and Corporate Governance*. New Jersey. Pearson.
- Winarsih, R., Prasetyono, dan M. S. Kusufi. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2009-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*. Universitas Mataram, Lombok.

LAMPIRAN

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTG	198	-.01734	.09219	.0222781	.01814304
KOM_AUD	198	2	5	3.14	.428
KOM_RMNSI	198	0	1	.15	.359
EKS_AUD	198	0	1	.37	.485
RMC	198	0	1	.08	.273
SIZE	198	11.46	19.28	14.3276	1.63373
Valid N (listwise)	198				

Tabel 2
Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F	df1	df2	Sig. F
1	.507 ^a	.257	.238	.01584196	.257	13.277	5	192	.000

a. Predictors: (Constant), SIZE, RMC, KOM_AUD, EKS_AUD, KOM_RMNSI
b. Dependent Variable: BTG

Tabel 3
Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.017	5	.003	13.277	.000 ^b
	Residual	.048	192	.000		
	Total	.065	197			

a. Dependent Variable: BTG

b. Predictors: (Constant), SIZE, RMC, KOM_AUD, EKS_AUD, KOM_RMNSI